

ANALISIS AKUNTANSI PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN PADA PT PROPERTY GROUP IMPERIUM MEDAN

Santi Koeswara

¹Prodi Akuntansi, STIE Professional Manajemen College Indonesia
Jl. H. Misbah Jl. Komp. Multatuli Indah No.11-14, A U R, Kec. Medan Maimun,
Kota Medan, Sumatera Utara

Keywords:

Accounting for revenue
recognition,
Expenses,
PT. Property Group
Imperium Medan

ABSTRACT

PT. Property Group Medan Empire is a company engaged in property. Real estate in a company can be declared competitive if it is in accordance with the development stage. The purpose of this research is to find out and analyze how accounting recognition of income and expenses on PT. Property Group Imperium Medan. This research uses descriptive method, namely the method of analyzing the problem by collecting data and grouping it in a sequence to describe each process, as well as the behavior of the object under study at PT. Property Group Imperium Medan so that it can provide objective information and information. The results of this study indicate that accounting for revenue recognition on PT. Property Group Imperium Medan was declared to be still incompatible with clear reporting transactions and in the principles and methods of sales in the calculation.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Santi Koeswara

Jl. H. Misbah Jl. Komp. Multatuli Indah No.11-14, A U R, Kec. Medan Maimun
Kota Medan, Sumatera Utara 20151
Email: santikoswara@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara umum, setiap perusahaan yang didirikan harus bisa menentukan perhitungan laba yang benar, hal ini dikarenakan berdampak dengan sumber laba yang mana berasal dari pengakuan pendapatan dan beban sehingga tidak terjadinya kesalahan pada pencatatan. Beberapa beban secara langsung terkait dengan pendapatan dan harus diakui dalam periode yang sama untuk masa mendatang, sehingga pada saat akan diakui beban tersebut dapat dibayarkan.

Penentuan dasar dari pengakuan pendapatan sangat ditentukan oleh sifat dan jenis perusahaan. Cara pengakuan pendapatan yaitu pengakuan pendapatan saat penjualan. Pengakuan pendapatan dan beban ini sangat penting, artinya untuk mendapatkan laba rugi yang wajar dapat menggunakan *accrual basic* dan *cash basic*.

Pada saat melakukan transaksi pendapatan dan beban harus dilaporkan secara terpisah. Jadi pendapatan dilaporkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pelaporan beban yang berhubungan dengan pendapatan tersebut dalam periode yang sama. Dalam PSAK 23 disebutkan bahwa, pada saat melakukan perhitungan dalam pengakuan pendapatan harus mempunyai prinsip dan metode yang digunakan oleh perusahaan atas penjualannya. Untuk menentukan harga jual terdapat 2 proses pencatatan dalam akuntansi, yakni penjualan dan metode cadangan seperti, pendekatan laporan laba rugi dan pendekatan neraca atau laporan keuangan.

Sehubungan dengan berbagai hal tersebut dipandang harus sesuai dengan SAK yang berlaku umum, khususnya dalam bidang *real estate* PSAK no 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan *real estate* yang berbunyi, Pendapatan penjualan bangunan sejenis lainnya diakui dengan metode akrual apabila memiliki kriteria, proses penjualan yang telah selesai, harga jual yang tertagih, penjual yang dapat mengendalikan resiko dan manfaatnya. Apabila penjual memberikan potongan harga jual/perjanjian jual sebagai insentif bagi pembeli agar melunasi harga lebih awal jumlah potongannya harus dibukukukan pada saat penjualan dan potongan harga yang diberikan dibebankan ke laba rugi pada periode pemberiannya.

Apabila suatu transaksi *real estate* tidak memenuhi kriteria metode akrual maka akan diakui sebagai metode deposit yang menerapkan bahwa penjual yang tidak mengakui pendapatan penjualan unit *real estate*, piutang dari transaksinya tidak diakui, unit *real estate* tetap dicatat sebagai aktiva penjual walaupun kewajiban telah dialihkan ke pembeli dan penyusutan unit *real estate* tetap diakui oleh penjual. Perusahaan PT.Property Group Imperium Medan ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti.

Perusahaan ini memiliki masalah dalam transaksi pengakuan pendapatan dan beban. Seharusnya pendapatan yang harus dilaporkan terdahulu bukan sebaliknya, dan perusahaan ini tidak sesuai dengan prinsip dan metode penjualan yang baik pada saat melakukan perhitungan dalam pengakuan pendapatan. Disamping itu, perusahaan ini juga tidak mempunyai sumber daya yang kuat untuk mendorongnya lebih maju, sehingga perusahaan ini kurang kompetitif dengan perusahaan lain. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntansi Pengakuan pendapatan dan Beban pada PT.Property Group Imperium Medan. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntansi Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT.Property Group Imperium Medan”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif biasanya fokus pada pengamatan secara mendalam, hasil yang telah diperoleh dari temuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berupa penyelidikan fenomena yang lebih menyeluruh, penelitian kualitatif dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Konsep penelitian kualitatif adalah pengumpulan dan pengolahan data non-numerik dan interpretasi makna data ini untuk meningkatkan pemahaman lokasi yang ditargetkan. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, subjektif dari sudut pandang partisipan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di instansi tersebut juga dapat dilihat adanya komunikasi yang baik antara petugas yang melayani dengan masyarakat yang datang. Tampak sifat mengayomi yang muncul dari petugas terhadap masyarakat baik dalam menyampaikan informasi maupun menjawab pertanyaan terkait pengurusan berkas yang ditanyakan oleh masyarakat.

Sumber Daya

Hasil observasi peneliti menunjukkan kurangnya sumber daya manusia di instansi ini menyebabkan pelayanan publik terutama dalam pengurusan Ktp menjadi lambat dan masyarakat yang membludak akibat ketidakcekan petugas dalam melayani masyarakat. Namun dalam hal.

fasilitas, instansi ini sudah tergolong baik karena sudah memperhatikan kenyamanan basic dari masyarakat seperti kamar mandi umum, parkir, ditambah lagi adanya ruang menyusui dan ketersediaan kursi roda untuk penyandang disabilitas/lansia paruh baya yang datang untuk mengurus keperluan berkas mereka.

Disposisi

Dukungan dari pusat terhadap instansi Disdukcapil ini masih memerlukan dukungan dan perhatian. Diingat bahwa sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam melakukan pengurusan Ktp di instansi ini masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, hanya terdapat satu alat untuk melakukan pencetakan dan perekaman Ktp, sedangkan banyak masyarakat yang datang untuk mengurus e-Ktp mereka jadi terhambat prosesnya.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi di instansi Disdukcapil ini sudah berjalan dengan baik dikarenakan seluruh petugas menjalankan tugas mereka sesuai dengan divisi masing-masing. Masyarakat yang datang mengaku dilayani dengan baik dan lancar dengan dokumen yang mereka perlukan. Pengerjaan dokumen standardnya hanya dilakukan selama 2 hari saja oleh instansi ini. Dan apabila ada keperluan mendesak seperti sakit atau keperluan untuk mengurus BPJS maka pihak Disdukcapil akan mengupayakan penyelesaian dokumen secepat mungkin.

Namun dengan catatan selama jaringan lancar dan mendukung untuk penyelesaian dari dokumen tersebut. Karena apabila jaringan sedang dalam kondisi tidak stabil, maka pengerjaan dokumen bisa lebih lama dari yang diperkirakan. Banyak masyarakat yang harus pulang padahal sudah mengambil nomor antrian hanya karena jaringan yang tidak stabil secara tiba-tiba. Hal tersebut menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat terutama mereka yang sudah mengantri lama namun tidak mendapatkan giliran untuk mengurus dokumen dikarenakan jaringan yang tidak stabil.

Faktor penghambat Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo. Berdasarkan hasil penelitian serta observasi penelitian, peneliti menemukan hambatan yang terjadi dalam Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah

Karo yaitu sebagai berikut: 1). Sumber Daya Manusia yang masih membutuhkan perhatian dari pusat dikarenakan masih ada kekurangan petugas dalam bidang perekaman KTP. Serta “penyegaran” petugas dikarenakan sudah terlalu banyak petugas yang lansia yang menyebabkan mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Penambahan fasilitas alat perekaman KTP karena hanya terdapat 1 unit di instansi ini sedangkan masyarakat banyak yang mengantri untuk mengurus dokumen, 2). Disposisi yang masih belum berjalan diakibatkan kurangnya dukungan pusat terhadap finansial kepada instansi Disdukcapil ini, 3). Jaringan yang tidak menentu menyebabkan proses pelayanan publik terutama perekaman dan pencetakan Ktp menjadi terhambat dan menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian implementasi pelayanan public dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo yang sudah dilaksanakan, maka hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo belum sepenuhnya terlaksana. Terdapat empat indikator dalam teori Edward III yaitu komunikasi, dimana komunikasi berjalan dengan baik maupun komunikasi langsung atau secara online. Selain komunikasi terdapat juga indikator Sumber Daya di bidang Sumber Daya Manusia serta Disposisi masih perlu untuk dioptimalisasikan. Karena petugas yang masih kurang serta fasilitas pendukung untuk perekaman KTP yang masih perlu untuk ditambah, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya dukungan finansial dari pusat dan perhatian di bidang sumber daya manusia mereka. Selain itu indikator disposisi juga masih belum berjalan dengan baik, karena dalam pelayanan sering terjadi gangguan jaringan, hal tersebut berdampak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo adalah SDM yang kurang, disposisi yang tidak teroptimalisasi dengan baik, serta jaringan yang tidak stabil dalam pelayanan di Instansi Disdukcapil

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Styoro Cahyo Wibowo. (2013). Pengaruh Pelatihan Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Teknisi Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Bojonegoro, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4).
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/6260/7112>
- Basrowi. Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta.
- Diana, Rianti, 2014. Analisis Data Kualitatif, Medan: USU Press.
- Fahmi. (2011). Peran Aparatur Dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan E-KTP (Studi Kasus di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate). 1-21.
- Fatmawati. (2019, Maret 12). Akuntabilitas Pelayanan Publik. Retrieved from <https://ideals.repec.org>
- Fisipol. (2020). November 13). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Retrieved from

<https://fisipol.uma.ac.id>

- H Zaenal Mukarom; Muhibudin Wijaya Laksana (2016) Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Pustaka Setia Bandung.
- H. Tachijan M.Si (2006) Implementasi Kebijakan Publik, Aipi Bandung – Puslit KP2w Lemlit UNPAD, Perpustakaan Nasional.
- Hardisyanyah, 2011, Kulatitas Pelayanan Publik., Yogyakarta: Gramedia.
- Hayati, R. (2022, Februari 11). Penegrtian INforman Penelitian, 3 Jenis, dan Contohnya. Retrieved from <https://penelitianilmiah.com>.
- Indra Muda. (2019). Implementasi Kebijakan publik, Medan : Medan Persada.
- Kalalo, T. K., Liando, D. M., & Sampe, S. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Pembuatan E-KTP Tahun 2016 Di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 1.
- Lestari, M., Saifurruhaidi, & Yuniarti, R. (2022). Faktor-Faktor Yang MEMPengaruhi Implementasi Kebijakan Dalam Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Di UPT Dukcapil Kecamatan Sukamulia. Jurnal Mentari Publika, 02, 237-245.
- Mulyadi. (2015). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik (konsep dan aplikasi proses kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung) : Alfabeta.
- Mulyono. (2009, Mei 28). Model Impelementasi Kebijakan George Edward III. Retrieved from <https://mulyono.staff.uns.ac.id>
- Pendidikan, D. (2022, Oktober 17). Implementasi Adalah. Retrieved from <https://www.dosenpendidikan.co.id>.
- Perangin, E. (2022, September 22). Blangko E-KTP Disdukcapil Karo Kosong, Warga sebut ada permintaan Uang. Retrieved from <https://www.dailyklik.id>
- Prawiro, M. (2019, Februari 25). Metode Penelitian Kualitataif : Pengertian, Tujuan, Karakteristik dan Jenisnya. Retrieved from <https://www.maxmanroe.com>
- Rahman Mulyawan (2016). Birokrasi Dan Pelayanan Publik. UNPAD Press.
- Rezkie, S. M. (2020, September 11). Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitataif. Retrieved from <https://www.dqlab.id>
- Salma. (2021, Desember 21). Teknik Pengumpulan Data : Pengertian, Jenis, dan Contoh. Retrieved from <https://bitlabs.id>.
- Satria, A. (2015, September 11). Pengertian Pelayanan Publik Dan Standar Pelayanan Publik Dalam Administrasi Negara Menurut Para Ahli. Retrieved from <https://www.materibelajar.id>
- Sri Maulidiah,S.Sos,M.Si (2014). Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan : Bandung,CV. Indra Prahasta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.Bandung: CV.Alfabeta.
- Sumut, S. D. (2020, Juli 20). Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Menyambut Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Karo. Retrieved from .